

**PENGUATAN KELEMBAGAAN SEBAGAI UPAYA
TRANSFORMASI DIGITAL UMKM DI DINAS
KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :
MUHAMAD DAFHA MAY RIZKI Y
NIM. 07011382025177**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PENGUATAN KELEMBAGAAN SEBAGAI UPAYA
TRANSFORMASI DIGITAL UMKM DI DINAS KOPERASI
DAN UKM KOTA PALEMBANG**

Diajukan Oleh :

MUHAMAD DAFHA MAY RIZKI Y

NIM. 07011382025177

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2023

Pembimbing,

Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si

NIP. 199508142019032020

Accept



Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA

NIP. 1969111019994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PENGUATAN KELEMBAGAAN SEBAGAI UPAYA TRANSFORMASI DIGITAL UMKM DI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 28 Februari 2024
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
NIP. 199508142019032020
Ketua



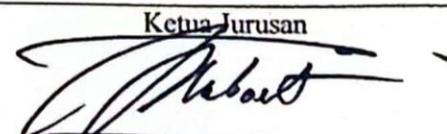
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001
Anggota



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNSRI, Prof. Dr. Antri, M. Si NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketua Jurusan  Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
---	---

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhamad Dafha May Rizki Y

Nim : 07011382025177

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Penguatan Kelembagaan Sebagai Upaya Transformasi Digital UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang di temukan dalam Skripsi ini dan pengaduan dari Pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang di jatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Palembang, 6 Maret 2024



Muhamad Dafha May Rizki Y

Nim. 07011382025177

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَلِّغُ أَمْرًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

"Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya."
(Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Papa Yudhi Sean dan Mama Misri Astuti
2. Para Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan, pengalaman dalam perjalanan studi penulis.
3. Kepala Dinas & Koperasi UMKM Kota Palembang, Staf dan karyawan yang telah membantu dalam administrasi dan kelengkapan dari penulis selama masa penulisan skripsi.
4. Devi Damayanti AMd.Kes yang telah membantu penulis selama masa skripsi
5. Almamater kebanggaan penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.wb

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam kepada Allah SWT, sumber segala karunia, rahmat, dan petunjuknya. Melalui pertolongannya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul "Penguatan Kelembagaan Sebagai Upaya Transformasi Digital UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang" Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana (S-1) di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis ingin mengekspresikan rasa terima kasih yang dalam atas berkat dan anugerah yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Januar Eko aryansyah, S.IP.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi
6. Kedua orang tua dan Keluarga yang Selalu Memberikan Dukungan Secara Doa serta Material Yang Senantiasa Mendukung Skripsi Ini.
7. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam perjalanan studi kami.
8. Kepada Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang, Terima Kasih atas Waktu dan Izin Telah Mengizinkan Penulis Untuk Melakukan Penelitian.
9. Kepada Devi Damayanti AMd.Kes Yang Memberikan Saran dan Dukungannya Sehingga Penulis Bisa Berada Di Titik Ini.
10. Kepada Teman-Teman Senantiasa Memberikan Dukungan Kepada Penulis.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam proses penulisan skripsi ini. Setiap masukan dan pandangan yang konstruktif sangat dihargai dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas skripsi ini menuju tingkat yang lebih baik. Semoga segala bentuk dukungan dan partisipasi yang diberikan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa.

Wassalamualaikum wr. Wb

Palembang, 31 Oktober 2023



Muhamad Dafha May Rizki Y

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penguatan kelembagaan sebagai upaya transformasi digital bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis implementasi program dan peran Dinas Koperasi serta UKM dalam mendukung perkembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan telah berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan adaptasi UMKM terhadap teknologi digital. Evaluasi kinerja dinas mencakup lima dimensi utama: organisasi, SDM, keuangan, infrastruktur, dan kerjasama organisasi, yang semuanya memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Selain itu, saran-saran yang diajukan meliputi penyediaan bantuan non-tunai yang beragam, pengumpulan data konkret mengenai kebutuhan UMKM, perhatian khusus untuk UMKM yang berkembang, galakan adopsi teknologi digital, dan dorongan kolaborasi antar pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan transformasi digital UMKM dan memperkuat ekosistem bisnis di Kota Palembang.

Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Transformasi Digital, UMKM, Dinas Koperasi dan UKM, Kota Palembang.

Pembimbing



Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si

NIP. 199508142019032020

Palembang, Maret 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research aims to explore the strengthening of institutions as an effort towards digital transformation for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Cooperative and SME Agency of Palembang City. A qualitative method was employed to analyze the implementation of programs and the role of the Cooperative and SME Agency in supporting the development of MSMEs. The findings indicate that institutional strengthening has played a crucial role in enhancing the performance and adaptation of MSMEs to digital technology. The evaluation of agency performance covers five main dimensions: organization, human resources, finance, infrastructure, and organizational cooperation, all of which have provided positive impacts on MSMEs. Moreover, the proposed recommendations include providing diverse non-cash assistance, collecting concrete data on MSMEs' needs, giving specific attention to emerging MSMEs, promoting the adoption of digital technology, and fostering collaboration among MSMEs. This study is expected to provide insights for the government and relevant institutions in enhancing the digital transformation of MSMEs and strengthening the business ecosystem in Palembang City.

Keywords: *Institutional Strengthening, Digital Transformation, MSMEs, Cooperative and SME Agency, Palembang City.*

Advisor



Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si

NIP. 199508142019032020

Palembang, Maret 2024
Chairman of the Public Administration Departement
Faculty of Sosial and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M. Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Akademik	12
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	12
1.5 Manfaat Praktis	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Penguatan Kelembagaan.....	14
2.1.2 Transformasi Digital.....	17
2.1.3 Proses Transformasi Digital Pada UMKM	21
2.1.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	22
2.1.5 Kriteria UMKM.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang).....	37

3.3	Fokus Penelitian	38
3.4	Informan.....	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6	Teknik Analisis Data	40
BAB IV		43
GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Umum.....	43
4.1.1	Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang.....	43
4.1.2	Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang ...	45
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang 46	
4.2	Hasil dan Pembahasan	58
4.2.1	Organisasi.....	58
4.3.2	Sumber Daya Manusia (SDM)	67
4.3.3	Keuangan.....	80
4.3.4	Infrastruktur	90
4.3.5	Kerja Sama Organisasi Jumlah Mitra dan Jenis Program pelatihan Bersama Pihak Eksternal.....	96
BAB V.....		112
PENUTUP.....		112
5.1	Kesimpulan	112
5.2	Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA		cxvi
PENDOMAN WAWANCARA PENGUATAN KELEMBAGAAN SEBAGAI UPAYA TRANSFORMASI DIGITAL UMKM DI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG		cxviii
LAMPIRAN.....		cxx

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Fitur Pelatihan Bidang UMKM & Pelatihan Bidang Koperasi	10
Gambar 2. Penciptaan Nilai dalam Transformasi Digital	19
Gambar 3. Pengiriman Nilai dalam Transformasi Digital	20
Gambar 4. Pengiriman Nilai dalam Transformasi Digital	21
Gambar 5. Tahapan Transformasi Digital untuk UMKM	22
Gambar 6. Tampilan Untuk mendaftarkan Produk ke Si Musi	24
Gambar 7. Kerangka Pemikiran	36
Gambar 8. Tampak Depan Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang.....	44
Gambar 9. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang	46
Gambar 10. Pembagian Sertifikat Pelatihan Kepada Narasumber dan Peserta	67
Gambar 11. Ibu Dede Penerima Bantuan Alat Pendingin.....	72
Gambar 12. Kegiatan Observasi dan Sidak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang Mengatasi SDM.....	72
Gambar 13. Kegiatan Dari Dinas Koperasi bagaimana Kualitas Kepemimpinan	75
Gambar 14. Partisipan Anggota Dinas Koperasi Kota Palembang dan UMKM	77
Gambar 15. Kompetensi dan Keterampilan Pelaku UMKM	79
Gambar 16. Siklus Keuangan Dinas Koperasi Kota Palembang	86
Gambar 17. Infrastruktur Dinas Koperasi Kota Palembang.....	92
Gambar 18. Surat Bantuan Untuk UMKM Kota Palembang.....	93
Gambar 19. Tampilan Lapkin (Laporan Kinerja)	96
Gambar 20. Acara Penyerahaan Bantuan Non Tunai Terhadap Pelaku UMKM, Mitra Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang.....	98
Gambar 21. Produk UMKM.....	102
Gambar 22. Pembukaan Sekaligus Pemberian Perlengkapan Pelatihan Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang.....	104
Gambar 23. Omset Penjualan Pada Masa Pandemi Covid-19	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perkembangan UMKM Kota Palembang.....	6
Tabel 2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah.....	25
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4. Fokus Penelitian	38
Tabel 5. Deskripsi Informan	57
Tabel 6. Komposisi Jenis Kelamin Pegawai	69
Tabel 7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja.....	82
Tabel 8. Rasio Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang tahun 2018-2021 ..	87
Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang Tahun 2018-2021	89
Tabel 10. Data Komunitas UMKM Kota Palembang Penerimaan Bantuan ...	106
Tabel 11. Pelaku UMKM Berhasil Dalam Usaha	106
Tabel 12. Perbandingan Jumlah UMKM	107
Tabel 13. Hasil Penelitian	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Tuntutan terhadap pelayanan publik saat ini menjadi salah satu permasalahan penting dan menjadi perhatian utama baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaknai dalam rangka pemenuhan kebutuhan seluruh warga negara terhadap suatu barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi dimana pemerintah wajib memberikan pelayanan sebagai sarana pelayanan publik sebagai pemberi pelayanan. Menurut Sinambala dalam buku “Reformasi Pelayanan Publik” (2014: 5), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik melalui terobosan inovasi. Menurut (Nova & Hikmah, 2022: 30).

Dalam upaya mengembangkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, pemerintah diharapkan melakukan inovasi dengan memanfaatkan E-Government. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu pasal 44 ayat (1), pelayanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3), salah satunya meliputi jasa yang menunjang kegiatan pekerja dan dunia usaha. Ayat (2) Pelayanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam

konteks ini, pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan E-Government merupakan langkah progresif, mewujudkan pemerintahan yang serba digital untuk memudahkan akses dan meningkatkan daya tanggap terhadap tuntutan zaman. E-Government merupakan fondasi untuk menghadirkan inovasi dalam penyampaian layanan publik. Inovasi hadir sebagai produk baru dan menggantikan cara-cara lama guna memperoleh kepuasan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Namun seringkali inovasi yang diterapkan tidak selalu mampu memberikan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. (Mahpudin, 2022) Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kepuasan masyarakat sebagai tolak ukurnya kinerja pelayanan publik. Perlu adanya inovasi dalam pelayanan publik yang dapat dicapai meningkatkan citra pelayanan publik dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Formalitas birokrasi Pemerintah saja tidak cukup harus mampu bertransformasi dengan teknologi masyarakat yang cenderung menginginkan pelayanan dan proses yang efektif dan efisien birokrasi yang lebih mudah.

Pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedang dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa saja yang diperlukan orang lain.

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara mereka berinteraksi satu sama lain, mencari informasi, dan melakukan bisnis. Hal ini juga mempengaruhi cara masyarakat memperoleh dan memproses informasi, serta mempercepat arus informasi yang tersebar. Namun, sisi negatif dari perkembangan teknologi digital ini adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang semakin meningkat, seperti peretasan, pencurian identitas, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan cyber. Hal ini berdampak pada stabilitas masyarakat dan sistem hukum yang ada (Bahram 2023).

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi sistem hukum dalam hal implementasi kebijakan publik dan pengambilan keputusan hukum. Hal ini terkait dengan penggunaan teknologi digital untuk memproses dan menganalisis data, termasuk data terkait dengan keamanan dan kejahatan siber. Pemerintah dan lembaga hukum harus dapat mengakses dan memproses data tersebut dengan cara yang aman dan efektif, sambil tetap memperhatikan hak privasi individu dan kebijakan data. Salah satu tantangan dalam menghadapi perubahan ini adalah menciptakan regulasi yang dapat memfasilitasi transformasi digital secara bertanggung jawab dan meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul (Kim et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi yang adaptif dan proaktif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan hukum dalam era digital. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital adalah terkait dengan penggunaan teknologi dalam bisnis dan kegiatan ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis membawa berbagai keuntungan, namun juga berdampak pada persaingan, keamanan data, dan hak kekayaan intelektual. Hal ini memerlukan regulasi yang tepat untuk memastikan persaingan sehat dan perlindungan hak-hak bisnis. Menurut sebuah laporan dari World

Economic Forum (2018), perubahan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh teknologi digital telah mempengaruhi dinamika pasar dan menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum (Bahram 2023).

Di era industry 4.0 perkembangan teknologi semakin pesat dan cepat evolusi yang terjadi dari penemuan di bidang teknologi maupun inovasi internet menyebabkan banyaknya perubahan. Berbagai macam aspek kehidupan manusia, seperti komunikasi maupun interaksi, juga mengalami perubahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Internet terhadap kehidupan bermasyarakat tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Dalam hal pemanfaatan internet agar memperoleh dampak positif seluas-luasnya tentu saja ini yang diharapkan. Misalnya saja bagaimana agar internet berfungsi sebagai media, mencari informasi dalam keperluan pekerjaan dan pendidikan serta berkomunikasi sehingga pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat, mudah dan murah.

Pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital dan internet tentu juga berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di dunia beralih dari yang semula konvensional (*offline*) menjadi digital (*online*). Saat ini internet sangat mendunia dalam kehidupan manusia. Bagi masyarakat, internet memang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan banyak tugas, akan tetapi ternyata internet pun membawa pengaruh dari hal-hal yang negatif pada mereka. Penggunaan internet memang sangat membantu dan meringankan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki usaha. Semakin meningkatnya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin signifikan terutama di tengah perkembangan teknologi komunikasi serta di masa pandemi Covid-19 beberapa tahun ini. Pemanfaatan internet

terbukti membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertahan pada masa pandemi Covid-19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di garis depan guncangan ekonomi selama pandemi Covid-19 terlebih ketika terjadi lockdown, telah menghentikan segala aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, terjadinya penurunan permintaan serta mengganggu rantai perekonomian di seluruh dunia.

Proses perubahan dari bentuk analog ke bentuk digital yang biasa dinamakan digitalisasi, yang mana proses melalui teknologi informasi sebagai digitalisasi. Pergantian milenium melihat kemajuan besar yang dibuat dengan teknologi seperti ponsel, pemrosesan data, komputasi terdistribusi, penyimpanan, dan jaringan seluler digital. Konversi digital ini lebih maju dari digitalisasi, dan dikategorikan pada tingkat berikutnya yang dikaitkan dengan istilah digitalisasi.

Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin (05/10/2020). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hal itu membawa perubahan penting dalam sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos di Indonesia, terutama dalam percepatan transformasi digital, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Torehan sejarah dan memberikan perubahan sangat signifikan bagi sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos. Undang-Undang Cipta Kerja sangat mendukung Program Transformasi Digital Nasional, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri telekomunikasi dan penyiaran serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatannya untuk kepentingan nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual tentang Kontribusi Legislasi Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

terhadap Transformasi Digital, Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru, dan Pertumbuhan Ekonomi Digital dari Aula Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (06/10/2020).

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tonggak sejarah baru hukum Indonesia. Pertama kali sebuah undang-undang komprehensif lahir untuk mereformasi, sinkronisasi dan melakukan perubahan tidak kurang 76 (tujuh puluh enam) undang-undang eksisting. “Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 76 undang-undang, secara garis besar mencakup 1) peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, 2) perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, 3) ketenagakerjaan, 4) riset dan inovasi, 5) kemudahan berusaha, 6) pengadaan lahan (land bank), 7) kawasan ekonomi, 8) investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategis Nasional, 9) Dukungan Administrasi Pemerintahan, dan 10) Sanksi,” paparnya. Berbagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia termasuk di kota Palembang saat ini mencoba untuk bertahan di pasaran karena persaingan yang begitu ketat untuk memperebutkan pelanggan, ditambah lagi dampak dari wabah virus corona (Covid-19) yang sedang marak saat ini.

Tabel 1. Data Perkembangan UMKM Kota Palembang

No	Bidang Usaha	Jumlah Usaha Unit		
		2020	2021	2022
1	Usaha Mikro	12.655	17.655	20.153
2	Usaha Kecil	27.475	30.122	33.211
3	Usaha Menengah	5.697	6.030	7.078
Jumlah		45.827	53.807	60.422

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang dalam Rianto, 2023

Dari data yang tersedia, jumlah UMKM telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlahnya meningkat sebanyak 45.827 unit pada tahun 2020, naik sebanyak 53.807 unit pada tahun 2021, dan mencapai 60.442 unit pada tahun 2022 (Rianto, 2023). Dengan banyaknya UMKM di Palembang, ada kemungkinan beberapa masalah akan muncul, seperti penutupan atau kebangkrutan. Ini terutama berlaku untuk UMKM yang belum mampu beradaptasi dengan masyarakat 5.0. Tantangan tambahan termasuk UMKM yang tidak memahami teknologi, kekurangan pelatihan digital, dukungan kebijakan yang buruk untuk mentor bisnis, dan infrastruktur digital yang perlu ditingkatkan. Selain itu, UMKM menghadapi tantangan dalam memperoleh modal dan memasarkan barang mereka (Jati, 2023).

Berdasarkan peraturan pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan yang yaitu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang, yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9

Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

Website Si Musi Palembang di buat untuk sebagai solusi para UMKM untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sekarang dari permasalahan yang di akibat perubahan Revolusi Industri 5.0. Si Musi Palembang juga suatu website untuk memantau bagaimana perkembangan para UMKM dalam menjajarkan beberapa produk mereka seperti makanan & Kriya dan ada beberapa jenis produk lain nya untuk mempermudah konsumen untuk mencari informasi tentang UMKM dan dapat menghubungi langsung UMKM. Berdasarkan website Dinas Koperasi dan UMKM yang dikenal dengan nama Si Musi Palembang

Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kota Palembang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan tugas pembantuan.

Misi Dinas Koperasi & UMKM Palembang mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi, adalah sebuah langkah yang sangat penting, UMKM (Usaha Mikro kecil dan Menengah) Memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pandangan pendapat dari masyarakat yakni untuk mencapai tujuan tersebut langkah yang bisah di ambil dari Dinas Koperasi.

Meningkatkan akses dan pendanaan dengan mendorong akses yang lebih baik sumber daya dan pendanaan adalah kunci. Itu bisa dilakukan dengan melakukan program-program pemerintah, kerjasama dengan lembaga keuangan atau bisa dengan

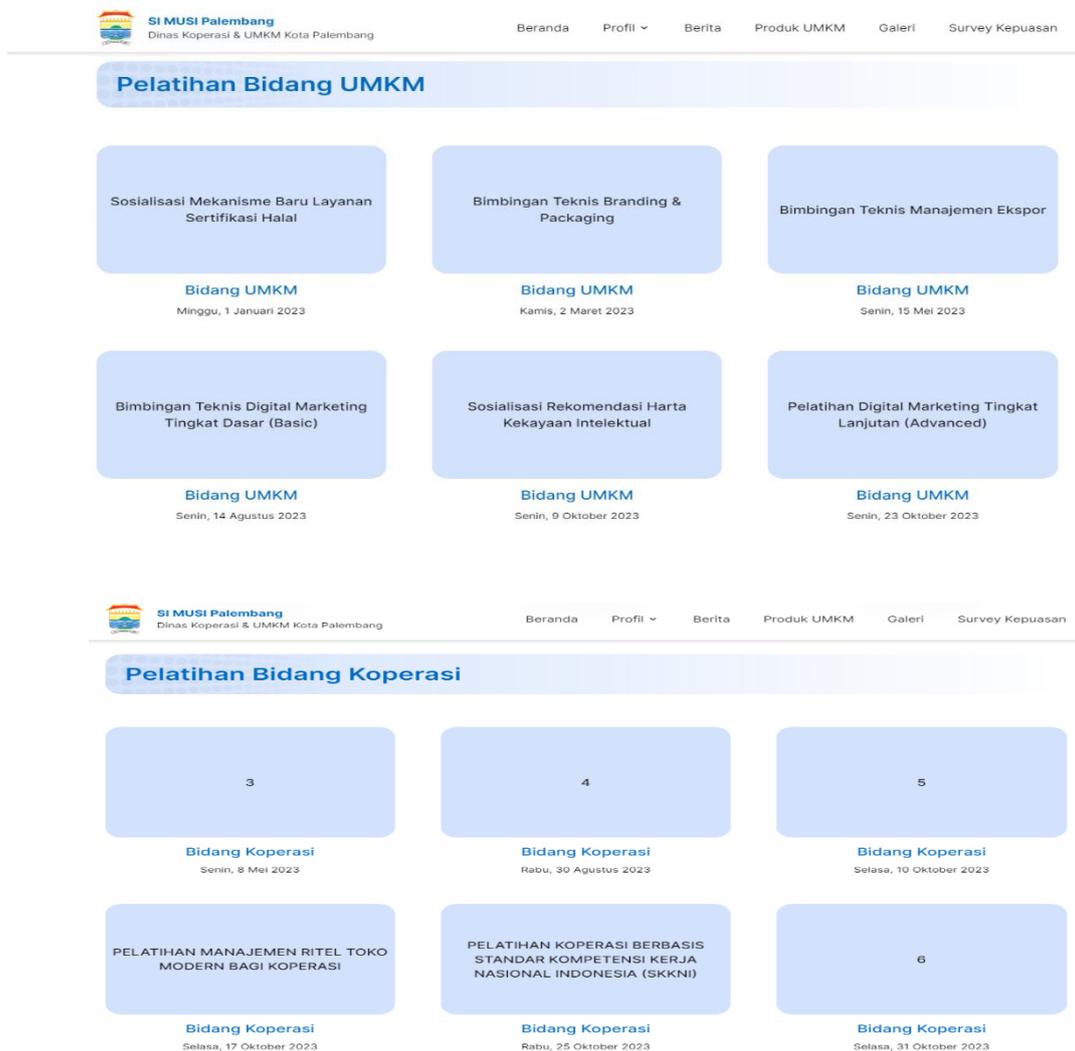
platform keuangan digital, untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam bentuk pinjaman dan investasi.

Mengembangkan inovasi dan kreativitas, yakni mendorong inovasi dan kreativitas dari UMKM tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan. Dukungan dalam riset pengembangan produk juga kunci memungkinkan UMKM menghasilkan produk atau layanan yang menarik dan bernilai.

Beberapa produk UMKM yang terdiri bermacam-macam produk dari makanan dan kerajinan dan juga, di dalam tampilan menu nya tersebut ada beberapa kategori untuk memudahkan pembeli seperti semua, makanan, Kriya lainnya. Dari tampilan fitur tersebut yang kalian bisa lihat di bagian produk UMKM, bahwa konsumen bisa mengakses produk yang ingin di beli dan jika ingin membeli suatu produk tinggal menekan tampilan gambaran produk tersebut ketika sudah konsumen akan dialihkan ke tampilan website tersebut dan terlihat akan adanya gambar produk berbagai macam seperti adanya harga produk, deskripsi dari produk tersebut jika ingin mencari lokasi Si Musi menyediakan alamat lengkap dari penjual tersebut jika kita ingin langsung membeli produk tersebut, terlihat fitur “Hubungi penjual” jika menekan fitur kita akan dialihkan langsung ke nomor whatsapp penjual.

Gambar 1. Menampilkan gambar beberapa hasil pelatihan bidang UMKM dan pelatihan bidang Koperasi dan di dalam tampilan fitur website tersebut ada track record hasil dari pelatihan dan untuk waktu pelaksanaan juga menampilkan hari dan tanggal tahun kegiatan tersebut.

Gambar 1. Tampilan Fitur Pelatihan Bidang UMKM & Pelatihan Bidang Koperasi



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis

Permasalahan yang dialami di dalam website tersebut ialah Tidak ada informasi untuk setiap pelatihan yang tersedia, Informasi masih belum transparan, Mengenai tampilan struktur organisasi masih tidak jelas untuk tampilan gambar nya. Memahami pentingnya adaptasi dinas UMKM tersebut terhadap perubahan transformasi digital, beberapa permasalahan yang mungkin akan timbul yaitu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi banyak umkm mungkin belum memiliki akses atau pengetahuan teknologi yang memadai untuk melakukan digitalisasi. Kurang nya pengetahuan tentang digitalisasi sebagian umkm mungkin tidak menyadari potensi atau manfaat

dari digitalisasi. Kekhawatiran tentang keamanan data, beralih ke lingkungan digital juga membawa resiko keamanan data, UMKM perlu bantuan dalam mengamankan data agar supaya terhindar kebocoran data. Dengan itu Dinas UMKM dapat mengidentifikasi permasalahan dan dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam membantu UMKM yang tidak terpantau

Kekuatan kelembagaan seringkali menjadi pendorong utama di balik proses transformasi yang berhasil. Ketika sebuah organisasi memiliki struktur yang kokoh, budaya kerja yang efisien serta sistem yang adaptif, itu bisa menjadi fondasi yang kuat untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan. Kelembagaan yang kuat dapat memfasilitasi transformasi dengan cara, Struktur yang responsif, budaya inovatif, sistem pendukung. Penelitian ini bisa menyelidiki berbagai hal, seperti seperti penguatan kelembagaan yang diterapkan untuk mendukung untuk UMKM dalam mengadopsi teknologi digital, jenis pelatihan yang disediakan untuk membantu pemilik para UMKM memahami. Ada banyak nya aspek yang menarik yang bisa dihadapi UMKM dalam mengadopsi teknologi hingga manfaat yang mereka peroleh setelah menerapkan solusi digital. Semoga penelitian ini dapat memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana penguatan dapat memainkan peran penting dalam mendukung UMKM dalam menghadapi perubahan digital.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian yang lebih mendalam terkait “Penguatan Kelembagaan Sebagai Upaya Transformasi Digital UMKM Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palembang”

1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dari hasil rumusan masalah dari penelitian ini ialah :

“Bagaimana Penguatan Kelembagaan Sebagai Upaya Transformasi Digital UMKM Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palembang ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari dalam penelitian ini ialah :

“Untuk mengetahui Penguatan Kelembagaan Sebagai Upaya Transformasi Digital UMKM Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palembang.”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan dampak positif dan hasil yang baik untuk peneliti dan para relawan manfaat penelitian.

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan siswa yang terlibat untuk mendapatkan pengalaman praktis dan keterampilan penelitian, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengevaluasi masalah pelayanan publik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang analisis dan teori. Hasilnya diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian dan studi di masa depan.

1.5 Manfaat Praktis

Ide dari website Si Musi Palembang diharapkan agar dari website ini bisa membantu banyak para pengrajin dan masyarakat UMKM bisa lebih luas cangkupan terhadap jualan dan membuat para dinas koperasi bisa tambah menambahkan inovasi terbaru dan meningkatkan penjualan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Boni Saputra, Hidayatul fajri, and Pratiwi Nurhabibi 2020; Erita and Mahendra 2017; Farhani and Chaniago 2021; Jayanti, Nearti, and Syukerti 2023; No Title n.d.; Rael 2022; Suryoto et al. 2022; Susilowati et al. 2021; Therapy et al. 2018; Vidyatmoko 2020)Alfiyah, Nur Inna, and Ida Syafriani. 2019. "Peran Pemimpin Transformasional Dalam Penguatan Kelembagaan (Studi Di Dinas Koperasi UMKM, Kabupaten Sumenep)." *Journal of Governance Innovation* 1(2): 37–48.
- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. (July): 1–23.
- Bahram, Muhammad. 2023. "Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2(5): 1733–46.
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. 2013. *NBER Working Papers*: 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Boni Saputra, Hidayatul fajri, and Pratiwi Nurhabibi. 2020. "Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(4): 743–53.
- Erita, E, and D Mahendra. 2019. "Dampak Caring Preceptor Dan Metode Preceptorship Dalam Meningkatkan Percaya Diri Perawat Baru Di Rsu Uki Jakarta [the" *Nursing Current: Jurnal Keperawatan* 5(2). <http://ojs.uph.edu/index.php/NCJK/article/view/1714>.
- Erita, and Donny Mahendra. 2017. "DAMPAK CARING PRECEPTOR DAN METODE PRECEPTORSHIP DI RSU UKI JAKARTA Upaya Menjadi RS Rujukan Di Wilayah Jakarta Timur Telah Akreditasi Versi KARS Masa Transisi Dari Dunia Pendidikan Kedunia Dengan Motto ' Melayani Bukan Dilayani ' Pada Bulan Desember 2016." *Nursing Current* 5(2): 69–87.
- Farhani, I, and H Chaniago. 2021. "Faktor Penentu Transformasi Digital UMKM: Bukti Dari Indonesia." *Prosiding Industrial Research Workshop ...*: 4–5. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2845/2224>.
- Ii, B A B. 2007. "No Title." : 24–56.
- Jayanti, Nirmala, Yuwinti Nearti, and Nanda Syukerti. 2023. "Pendampingan Dan Penyuluhan Penguatan UKM Pempek Ikan Gabus Palembang Menjadi Kelembagaan Koperasi Kota Palembang Pada Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara* 7(2): 486–95.
- Rael, R M Hafiz Ramdani. 2022. "Kebijakan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Umkm Pasca Pemberlakuan Pembatasan Sosial Dan Kegiatan Masyarakat Di Kota" [http://repository.uin-suska.ac.id/64503/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/64503/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/64503/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/64503/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf).
- Suryoto, Suryoto et al. 2022. "Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)* 1(2): 82–91.
- Susilowati, Nurdian et al. 2021. "Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa

- (BUMDes) Sumber Arto Desa Kenteng.” *Jurnal Abdimas* 25(2): 175–80.
- Teori, A Pengertian, and Menurut Jonathan. 2011. “Landasan Teori.” (1992): 1–13.
- Therapy, Cognitive et al. 2018.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.
- Vidyatmoko. 2020. “Jurnal Analisis Kebijakan | Vol. 4 No. 2 Tahun 2020.” *Jurnal Analisis Kebijakan* 4(2): 26–39.
- (Amalia Yunia Rahmawati 2020)Alfiyah, Nur Inna, and Ida Syafriani. 2019. “Peran Pemimpin Transformasional Dalam Penguatan Kelembagaan (Studi Di Dinas Koperasi UMKM, Kabupaten Sumenep).” *Journal of Governance Innovation* 1(2): 37–48.
- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. (July): 1–23.

PEDOMAN WAWANCARA PENGUATAN KELEMBAGAAN SEBAGAI UPAYA TRANSFORMASI DIGITAL UMKM DI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG

PERTANYAAN :

1. Apa langkah konkrit yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang untuk memperkuat kelembagaan UMKM terkait transformasi digital?
2. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM dalam memberdayakan UMKM agar mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya?
3. Program atau inisiatif apa saja yang diluncurkan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendukung UMKM dalam mengadopsi solusi teknologi digital?
4. Bagaimana pendekatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam mengedukasi dan meningkatkan literasi digital seperti SI MUSI di kalangan pemilik UMKM?
5. Adakah kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain seperti lembaga pendidikan atau perusahaan teknologi untuk mendukung transformasi digital UMKM di Kota Palembang?
6. Bagaimana efektivitas program penguatan kelembagaan ini dievaluasi atau diukur dalam mendukung UMKM dalam mengadopsi teknologi digital?
7. Apa saja tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi transformasi digital, dan bagaimana upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengatasinya?
8. Bagaimana rencana Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang ke depan untuk meningkatkan upaya penguatan kelembagaan guna mendukung transformasi digital UMKM?
9. Bagaimana evaluasi atau pengukuran keberhasilan program penguatan kelembagaan yang telah dilakukan untuk mendukung transformasi digital UMKM?
10. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam mendorong adopsi teknologi di kalangan UMKM, dan bagaimana lembaga ini menyikapi tantangan tersebut?
11. Apa kegunaan fungsi dari website LAPKIN ?
12. Apakah operator website LAPKIN sama seperti SI MUSI (pak Cholid) ?

13. Gambaran Isi Halaman LAPKIN, Beranda website LAPKIN, dll ?
14. Bagaimana Infrastruktur di Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang sudah baik ?
15. Bagaimana Ketersediaan fasilitas sarana untuk pegawai dan pelaku UMKM
16. Berapa jumlah Mitra/Pihak Eksternal di Dinas Koperasi kota Palembang dari tahun ? dan apakah sudah berjalan baik ?